

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KOMPARASI PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN NOMOR 35-39-PKE-DKPP/II/2023 DENGAN NOMOR 90-
PKE-DKPP/V/2024 TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE
2022-2024**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

Feri Amsari, S.H., M.H., L.LM.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KOMPARASI PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN NOMOR 35-39-PKE-DKPP/II/2023 DENGAN NOMOR 90-PKE-
DKPP/V/2024 TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2022-2024**

(Nabilla Huriyah, 2110112191, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68
Halaman, 2025)

ABSTRAK

Pelanggaran kode etik berulang oleh Ketua KPU RI periode 2022–2024 menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dan etik dalam dua putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari serta menelaah standar yang digunakan DKPP dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dua putusan DKPP: Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023 dan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan pertama DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir atas relasi pribadi yang tidak etis antara Ketua KPU dan Ketua partai politik, sementara dugaan pelecehan seksual dinyatakan tidak terbukti karena kekurangan bukti materiil. Dalam putusan kedua, DKPP menjatuhkan pemberhentian tetap karena pelanggaran etik berat berupa pelecehan seksual, penyalahgunaan jabatan, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pendekatan DKPP dalam kedua perkara tersebut masih bersifat kasuistik dan belum berpijak pada standar penilaian etik yang terukur dan konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pedoman yang baku dalam penjatuhan sanksi menimbulkan potensi inkonsistensi hukum dan ketidakpastian etik dalam peradilan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar DKPP menyusun pedoman penjatuhan sanksi etik yang sistematis dan objektif, serta mendorong KPU dan Bawaslu memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan etik untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Kata Kunci: Kode Etik, DKPP, Ketua KPU, Sanksi Etik

***LEGAL ANALYSIS OF THE COMPARATIVE DECISION OF THE HONORARY
COUNCIL NUMBER 35-39-PKE-DKPP/II/2023 WITH NUMBER 90-PKE-DKPP/V/2024
REGARDING VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS BY THE CHAIRMAN OF
THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE PERIOD 2022-2024***

(Nabilla Huriyah, 2110112191, Faculty of Law, Andalas University, 68 Pages, 2025)

ABSTRACT

Repeated violations of the code of ethics by the chairman of the Indonesian General Elections Commission for the 2022–2024 period raise questions about the consistency of the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in imposing sanctions. This study examines the legal and ethical constructions in two DKPP decisions against Hasyim Asy'ari and examines the standards used by the DKPP in determining sanctions for ethical violations committed. The research method uses a normative legal approach with a qualitative analysis of two DKPP decisions: Number 35-39-PKE-DKPP/II/2023 and Number 90-PKE-DKPP/V/2024. The results of the study show that in the first decision, the DKPP imposed a final stern warning sanction for the unethical personal relationship between the chairman of the KPU and the chairman of a political party, while allegations of sexual harassment were declared unproven due to lack of material evidence. In the second decision, the DKPP imposed permanent dismissal due to serious ethical violations in the form of sexual harassment, abuse of office, and use of state facilities for personal gain. The DKPP's approach in both cases is still casuistic and not based on measurable and consistent ethical assessment standards. This study concludes that the absence of standard guidelines in imposing sanctions creates the potential for legal inconsistency and ethical uncertainty in the election organizer's trial. Therefore, it is recommended that the DKPP prepare systematic and objective ethical sanctioning guidelines and encourage the KPU and Bawaslu to strengthen the ethical guidance and supervision system to prevent future violations.

Keywords: Code of Ethics, DKPP, Chairman of KPU, Ethical Sanctions